1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. **Inflasi Kota Palu pada September 2026:**
       Pada September 2026, inflasi Kota Palu tercatat sebesar 2,80% (y-on-y), 2,82% (y-to-d), dan 0,17% (m-to-m) dengan IHK sebesar 112,02. Inflasi tahunan menurun dibandingkan September 2025 sebesar 3,03%. Pada Triwulan III 2026, Kota Palu termasuk dalam 10 kota dengan tingkat inflasi terendah.

    2. **Komoditas penyumbang inflasi:**
       - Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama didorong oleh makanan, minuman, dan tembakau (3,33%; andil 0,79%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (8,60%; andil 0,76%), serta transportasi (4,25%; andil 0,58%)
       - Kenaikan harga terutama berasal dari cabai rawit, minyak goreng, cabai merah, emas perhiasan, dan angkutan udara. Sementara itu, penurunan harga beras dan bawang merah membantu menahan tekanan inflasi.
       - Pergerakan harga komoditas September 2026 (m-to-m) menunjukkan kenaikan pada cabai rawit (andil 0,16%), cabai merah (0,06), telur ayam ras (0,03), dan daging ayam ras (0,03). Sebaliknya, penurunan harga ikan selar/tude (-0,13), beras (-0,04), dan emas perhiasan (-0,02) menahan laju inflasi.

    3. **Risiko ke depan**
       Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), peningkatan permintaan berpotensi mendorong kenaikan harga cabai, telur, daging ayam ras, dan ikan laut serta BAPOKTING lainnya. akibat tekanan pasokan dan distribusi. Peningkatan mobilitas masyarakat juga berisiko menaikkan tarif angkutan udara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemantauan stok dan harga secara berkala, serta antisipasi gangguan distribusi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Keterbatasan kewenangan intervensi harga, terutama terhadap komoditas seperti emas perhiasan, angkutan udara, BBM, dan sejumlah komoditas pangan strategis yang dipengaruhi mekanisme pasar maupun kebijakan pemerintah pusat.
    2. Keterbatasan pasokan komoditas pangan strategis, khususnya cabai rawit merah dan hijau, cabai merah, serta bawang merah akibat terbatasnya pasokan dari luar daerah, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga.
    3. Risiko penurunan produksi pertanian akibat fenomena El Niño, yang dapat menyebabkan kekeringan, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan risiko gagal panen dan terganggunya pasokan pangan.
    4. Kendala pelaksanaan program pengendalian inflasi, meliputi rendahnya realisasi anggaran akibat menunggu DPA Perubahan, penyesuaian anggaran karena efisiensi, keterlambatan pengadaan, serta belum terealisasinya pekerjaan fisik.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1.Keterjangkauan Harga

Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

- Kegiatan pasar murah ditargetkan sebanyak 16 kali, dengan realisasi sebanyak 12 kali dan 4 kali lagi direncanakan pada Triwulan IV.
- Kegiatan Pasar Murah Keliling (Palu Gade Nolumako) dengan target sebanyak 23 kali telah direalisasikan sebanyak 23 kali, dan telah diusulkan dalam Anggaran Perubahan untuk penambahan pelaksanaan kegiatan, adapun jumlah kegiatannya akan dilaporkan kemudian.
- Kegiatan revitalisasi pasar modern Tavanjuka baru terealisasi sebesar 29%, karena terdapat pekerjaan yang jadwal pelaksanaannya bergeser dari Triwulan II ke Triwulan III dan IV.
- Realisasi kegiatan penyediaan informasi harga pangan baru mencapai 56 %.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:
- Kegiatan Gerakan Pangan Murah ditargetkan sebanyak 4 kali, dengan realisasi sebanyak 3 kali, sedangkan 1 kali kegiatan sisanya direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- Kegaitan Pasar Tani ditargetkan sebanyak 4 kali dengan realisasi sebanyak 3 kali.
- Hasil Produksi Palu MAPAN seperti Komoditas Tomat dan Sayuran (Kangkung) dijual pada Kegiatan JAMILA (Belanja Minggu Kendalikan Inflasi).

2. Ketersediaan Pasokan

- Dinas Sosial
- Realisasi kegiatan pengelolaan data fakir miskin telah mencapai 88 %, termasuk realisasi anggarannya, dan sesuai dengan target.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- Bantuan Usaha bagi Pelaku UMKM terdiri atas dua jenis, yaitu bantuan modal usaha sebesar Rp2 juta bagi masyarakat dan sebesar Rp5 juta bagi wirausaha pemula dan bantuan Peralatan bagi 17 Kelompok Usaha Bersama.
- Bantuan Modal Usaha sebesar Rp2 juta, kendala: penerbitan surat keputusan (SK) telah diproses untuk sekitar 131 orang, sedangkan verifikasi calon penerima lainnya masih berlangsung. Rencana penyerahan belum dapat dilaksanakan karena padatnya jadwal kegiatan.
- Bantuan Modal Usaha wirausaha pemula (Rp5 juta): masih dalam proses verifikasi bersama perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mendaftar. Pelatihan bagi wirausaha pemula dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad), dan Kejaksaan telah siap menyampaikan materi.
- Bantuan peralatan: SK telah diproses, namun penyalurannya ditahan sementara agar didampingi aparat penegak hukum (APH) karena nilainya besar, yaitu lebih dari Rp4 miliar. Telah dilakukan ekspos kepada Kejaksaan, dan bersama Kejaksaan akan dilakukan peninjauan lapangan pada pekan ini, terutama terhadap kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRD.
- Sebagian bantuan peralatan bersumber dari pokir dengan nilai di atas Rp50 juta per kelompok yang beranggotakan minimal lima orang, antara lain usaha laundry (Rp63 juta untuk pembelian mesin) dan es kristal. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan usaha telah berjalan: usaha yang akan dikembangkan dapat dibantu sesuai petunjuk teknis, sedangkan usaha yang dimulai dari nol tidak diberikan bantuan.
- Dana pendampingan tidak tersedia pada saat penetapan anggaran awal sehingga pelaksanaannya diperlambat dan dimasukkan dalam perubahan anggaran yang baru
-

ditetapkan. Seluruh administrasi telah dilaksanakan; selanjutnya tinggal proses bersama Kejaksaan dan peninjauan lapangan. Diharapkan sebagian bantuan peralatan dapat dicairkan pada bulan ini.
- Pada pekan ini BPKP dan Kejaksaan akan hadir terkait tambahan pokir pada perubahan anggaran sebesar sekitar Rp700 juta. BPKP mengingatkan bahwa kegiatan yang telah tercantum dalam batang tubuh anggaran dan dokumennya lengkap harus dilaksanakan, sedangkan kegiatan yang belum siap tidak dilaksanakan, karena kegiatan yang tidak dilaksanakan dapat menjadi temuan.
- Pelaksanaan job fair diikuti oleh 2.272 pelamar, dengan 534 pelamar diterima. Nilai transaksi UMKM tercatat sebesar Rp1,49 miliar (sebelumnya Rp1,1 miliar). Disampaikan bahwa Wali Kota menyebut nilai lebih dari Rp2 miliar, dan apabila seluruh transaksi dihitung, nilainya hampir mencapai Rp3 miliar.
- Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, diusulkan agar job fair cukup dilaksanakan selama dua hari supaya tersedia ruang yang lebih luas bagi penonton.
- Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro berupa bantuan kepada kelompok pengolah hasil perikanan, antara lain boks dan termos ikan, serta perlengkapan bagi kelompok pengolah hasil ikan seperti pempek dan otak-otak. Anggaran yang disebutkan sebesar Rp229 juta untuk 10 kelompok.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Pengadaan perahu sebanyak 80 unit: berdasarkan monitoring, progres fisik mencapai 50 % sedangkan waktu pelaksanaan telah terpakai 52 %. Pembuatan perahu dilakukan di wilayah Taipa, dan penyerahan dilaksanakan pada akhir kontrak, yaitu 14 Desember.
- Sebagian bantuan merupakan pokir, antara lain biofloc berukuran 2 meter.
- Saprodi cabai dan bantuan untuk Kawatuna telah direalisasikan. Kegiatan lainnya mencakup hidroponik, saprodi anggur, dan saprodi bawang merah. Beberapa kegiatan direvisi untuk dialihkan ke Kawatuna, dan hand tractor merupakan pokir sebanyak satu unit.
- Hasil panen bawang merah pada dua lokasi masing-masing sekitar 250 kilogram dan kurang baik akibat serangan hama dan penyakit, sedangkan di Betobo hasil panen sekitar 1.000 kilogram. Untuk mengatasi tanah yang jenuh akibat penanaman bawang merah secara terus-menerus, dilakukan pergiliran tanam.
- Di Tanamodindi, penanaman bawang merah sebelumnya gagal, diduga karena kekurangan air, dan saat ini dipersiapkan penanaman kembali. Pada cabai rawit di Buluri, tanaman terkendala air dan mengering.
- Kegiatan kelompok wanita tani pada tahap terakhir diintegrasikan ke dalam Program Palu MAPAN, dan sisa anggarannya difokuskan sebagian untuk membiayai kegiatan Palu MAPAN. Sasaran kegiatan mencakup kelompok wanita tani dan dasawisma.
- Pengadaan cadangan pangan bersama Bulog direncanakan terkontrak pada akhir triwulan dan direalisasikan pada Triwulan IV, menunggu revisi. Nilai total yang disebutkan adalah 22,8 (terdiri atas sisa tahun lalu 14,9 dan tahun ini 8), satuan belum disebutkan dalam catatan rapat.
- Beberapa kegiatan memerlukan revisi, dan anggaran untuk kegiatan penanaman belum tersedia pada perubahan anggaran ini.
- Dinas Pekerjaan Umum
- Realisasi kegiatan irigasi permukaan dan jalan distribusi dilaporkan mencapai 90 %.
- Pekerjaan irigasi untuk mendukung ketersediaan pasokan telah mencapai 100 %. Tersisa proses pencairan yang mensyaratkan Provisional Hand Over (PHO) dan kelengkapan administrasi.
- Terdapat intervensi Balai untuk irigasi pada lima lokasi, yaitu Tanamodindi, Poboya, Kawatuna, Duyu, dan Lambara. Saat ini dilakukan komunikasi dan asistensi dengan

pihak Balai untuk melengkapi data usulan yang telah disetujui.
- Antisipasi pasokan difokuskan pada wilayah utara, sedangkan di wilayah selatan tidak terdapat permasalahan.
- Disampaikan bahwa beberapa keluarga dan kelompok tani dibantu dengan penyaluran air menggunakan mobil tangki air, serta penyiraman tanaman dilakukan atas permintaan. Setiap kelompok diminta menyiapkan tempat penampungan air; antara lain di Buluri Utara dilakukan pengisian penampungan menggunakan dua mobil tangki.
- Bantuan penyaluran air tersebut belakangan dihentikan sementara karena kesulitan memperoleh solar, termasuk solar eceran.

3. Kelancaran Distribusi

- Dinas Pekerjaan Umum
- Penguatan Jembatan 3 telah mulai dikerjakan. Pekerjaan pengaliran air direncanakan agar pengecoran lebih mudah, dan pelaksanaan pengecoran memerlukan kondisi tidak hujan.
- Dinas Perhubungan
- Realisasi kegiatan angkutan BAPOKTING dalam kegiatan Pasar Murah, GPM dan Pasar Tani sampai dengan Triwulan III telah mencapai 50% dari target yang ditetapkan.

4. Komunikasi Efektif

- Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Kegiatan pengelolaan informasi berjalan sesuai target. Tersisa satu kegiatan, yaitu layanan internet masyarakat yang dilaksanakan melalui pihak ketiga dengan penagihan berdasarkan pemakaian.
- Realisasi anggaran layanan internet masyarakat tidak dapat dipastikan karena bergantung pada pemakaian. Nilai tagihan umumnya berada di bawah rencana, misalnya ditetapkan Rp60 juta per bulan sedangkan yang terpakai sekitar Rp50 juta. Layanan tersebut akan digunakan penuh sampai dengan Desember.
- Pada pembahasan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) pengadaan videotron, pihak BTN tidak menghendaki videotron dikomersialkan. Pengelolaannya dilakukan oleh BTN dan Pemerintah Kota; dari pihak Pemerintah Kota, sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum yang berhubungan dengan pihak BTN. Berdasarkan rapat awal, biaya listrik dan internet ditanggung oleh BTN sampai kerja sama berakhir.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kota Palu sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan kemajuan, terutama pada pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga dan stok pangan, serta pengawasan komoditas strategis. Inflasi tahunan September 2026 sebesar 2,80%, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar 3,03%. Namun, tekanan harga masih perlu diwaspadai, khususnya pada komoditas pangan strategis, emas perhiasan, dan transportasi. Evaluasi Pelaksanaan Strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga.

Pelaksanaan Pasar Murah oleh Disperindag telah mencapai 12 dari target 16 kali (75%), sedangkan Pasar Murah Keliling melalui Mobil Palu Gade Nolumako telah mencapai 23 dari target 23 kali (100%). Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani oleh Dinas Pertanian telah terlaksana 3 dari target 4 kali (75%). Kegiatan ini perlu dipertahankan dan diarahkan pada wilayah serta komoditas yang mengalami kenaikan harga.

2. Ketersediaan Pasokan.

Realisasi bantuan sarana budidaya ikan baru mencapai 18%, sedangkan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian masih menghadapi kendala pencairan anggaran dan revisi anggaran. Kondisi ini memerlukan percepatan pelaksanaan program untuk mendukung produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

3. Kelancaran Distribusi. Revitalisasi Pasar Vinase telah mencapai 92%, tetapi pemeliharaan Pasar Tavanjuka baru mencapai 29% akibat perubahan jadwal. Sementara itu, realisasi pembangunan dan pemeliharaan berkala oleh Dinas PU sebesar 25,5%. Diperlukan percepatan pekerjaan sesuai jadwal agar dukungan infrastruktur terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi pangan dapat berjalan optimal.
4. Komunikasi Efektif.

Pengawasan harga dan stok BAPOKTING, LPG 3 kg, serta BBM solar telah mencapai realisasi 86%. Pencatatan harga 42 komoditas pangan strategis mencapai 75%, sedangkan pengawasan Tanda Daftar Gudang mencapai 72%. Kegiatan ini perlu diperkuat melalui pemantauan rutin, pertukaran informasi antar perangkat daerah, serta tindak lanjut cepat terhadap indikasi kelangkaan dan kenaikan harga.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kota Palu sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 telah menunjukkan kemajuan, khususnya pada pasar murah keliling dan pengawasan harga serta stok. Namun, beberapa kegiatan produksi pangan dan pembangunan infrastruktur masih memerlukan percepatan karena realisasinya relatif rendah. Oleh karena itu, fokus pada Triwulan IV perlu diarahkan pada percepatan realisasi program, penguatan pasokan pangan lokal, stabilisasi harga komoditas strategis, dan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan permintaan menjelang Nataru.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pengendalian harga pangan:

Meningkatkan intensitas pasar murah dan gerakan pangan murah secara tepat sasaran, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang Nataru.

2. Penguatan pasokan lokal:

Mengoptimalkan pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah surplus serta memperkuat koordinasi dengan daerah pemasok guna menjamin kesinambungan distribusi dan ketersediaan pasokan pangan strategis serta menjaga stabilitas harga di Kota Palu.

3. Percepatan realisasi anggaran:

menyelesaikan penyesuaian administrasi dan revisi anggaran, mempercepat pengadaan, serta

mengawasi kemajuan pekerjaan fisik agar target Triwulan IV dapat tercapai.

4. Penguatan pemantauan dan evaluasi:

Menetapkan indikator kinerja yang terukur, meliputi capaian kegiatan, perkembangan stok, perubahan harga komoditas, dan disparitas harga antarwilayah, sehingga efektivitas program terhadap pengendalian inflasi dapat dievaluasi secara objektif.